

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM di Kecamatan Indramayu

Bagus Margono

¹Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Nahdlatul Ulama Indramayu

ARTICLE INFO

Article history:

Article history:
Received August 20, 2025
Revised 25 August 2025
Accepted 25 August 2025
Available online 07 Sept. 2025

Kata Kunci:

UMKM, laporan keuangan, SAK EMKM.

Keywords:

MSMEs, financial statements, SAK EMKM



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman, praktik pelaporan keuangan, dan sejauh mana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dilakukan oleh pelaku UMKM di Kecamatan Indramayu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pada beberapa UMKM yang dipilih secara purposif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, dengan analisis data model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK EMKM masih sangat rendah; sebagian besar responden belum pernah mendengar atau memahami standar tersebut. Dalam praktiknya, pelaporan keuangan yang dilakukan masih bersifat informal dan sederhana, sebagian besar hanya berupa catatan manual tanpa struktur yang sesuai standar. Tidak ditemukan UMKM yang menyusun laporan keuangan secara lengkap berdasarkan ketentuan SAK EMKM. Hambatan utama dalam penerapan SAK EMKM adalah rendahnya literasi akuntansi, minimnya pendampingan, dan anggapan bahwa akuntansi tidak relevan bagi usaha kecil. Temuan ini mengindikasikan perlunya sosialisasi berkelanjutan, pelatihan teknis, dan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan asosiasi profesi untuk meningkatkan

literasi akuntansi serta mendukung penerapan SAK EMKM di kalangan UMKM. Penerapan standar yang tepat diharapkan dapat mendorong transparansi, profesionalisme, dan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di masa depan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of understanding, financial reporting practices, and the extent to which the Micro, Small, and Medium Entity Financial Accounting Standards (SAK EMKM) are implemented by MSME actors in Indramayu District. This research employs a descriptive qualitative approach using a case study method on selected MSMEs through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The results indicate that MSME actors' understanding of SAK EMKM remains very low; most respondents had never heard of or understood the standard. In practice, financial reporting is still informal and simplistic, mostly limited to manual records without standardized structure. None of the observed MSMEs prepared complete financial statements based on SAK EMKM requirements. The main obstacles in implementing SAK EMKM include low accounting literacy, lack of technical assistance, and the perception that accounting is irrelevant for small-scale businesses. These findings highlight the urgent need for continuous outreach, technical training, and collaboration among local governments, educational institutions, and professional associations to enhance accounting literacy and support SAK EMKM adoption among MSMEs. Proper implementation of the standard is expected to promote transparency, professionalism, and easier access to financing for MSME actors in the future.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa lebih dari 64 juta unit UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyediakan sekitar 97% lapangan pekerjaan (KemenkopUKM, 2023). Peran signifikan UMKM tidak hanya sebagai

*Corresponding author

E-mail addresses: Bagusm450@gmail.com

penopang ekonomi nasional, tetapi juga sebagai agen penyerap tenaga kerja dan penggerak ekonomi lokal, termasuk di wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Di tengah kontribusi yang besar tersebut, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengelolaan dan pelaporan keuangan. Banyak pelaku UMKM yang masih menjalankan usahanya secara tradisional, tanpa sistem pencatatan keuangan yang memadai. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan, yang pada gilirannya menghambat UMKM dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti perbankan. Tanpa laporan keuangan yang baik, UMKM sering kali dianggap tidak bankable dan sulit untuk dikembangkan secara berkelanjutan (Setyowati & Lestari, 2021).

Menjawab permasalahan ini, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) meluncurkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada tahun 2016, yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2018. SAK EMKM dirancang untuk memenuhi kebutuhan laporan keuangan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan umum. Standar ini mempermudah pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dengan hanya mencakup tiga laporan utama: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. SAK EMKM tidak mewajibkan penyusunan laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, sehingga dianggap lebih sederhana dan praktis dibandingkan SAK Umum (IAI, 2018).

Namun dalam praktiknya, penerapan SAK EMKM masih belum merata di kalangan UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui, memahami, atau mengimplementasikan standar ini dalam pencatatan dan pelaporan keuangannya. Studi oleh Nurhasanah dan Harahap (2020) mengungkapkan bahwa lebih dari 70% pelaku UMKM belum pernah mendengar SAK EMKM, sementara sisanya belum mengerti cara penerapannya. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketersediaan standar dengan implementasi di lapangan. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya literasi akuntansi pelaku UMKM, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pendampingan dari pihak berwenang, hingga minimnya pelatihan teknis yang relevan.

Fenomena serupa juga ditemukan di berbagai daerah, termasuk di wilayah Kabupaten Indramayu. Kecamatan Indramayu sebagai pusat kegiatan ekonomi kabupaten memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM di berbagai sektor, seperti kuliner, industri rumah tangga, kerajinan, serta jasa. Namun demikian, banyak pelaku usaha di wilayah ini yang masih menjalankan usahanya secara konvensional dan belum menerapkan sistem pencatatan keuangan yang sesuai standar. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan pelaku UMKM dalam menilai kinerja usahanya secara objektif, serta kesulitan dalam memperoleh pembiayaan atau menjalin kerja sama dengan mitra usaha yang membutuhkan informasi keuangan yang andal.

Penerapan SAK EMKM di UMKM Kecamatan Indramayu sangat penting untuk diteliti mengingat potensi daerah yang besar namun belum diimbangi dengan kapasitas manajerial dan akuntansi yang memadai. Implementasi SAK EMKM bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas usaha kecil dan mikro. Dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar yang diakui secara nasional, UMKM diharapkan mampu memperoleh kepercayaan lebih dari investor, lembaga keuangan, dan mitra bisnis.

Berbagai inisiatif sosialisasi dan pendampingan penerapan SAK EMKM telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan perguruan tinggi, namun sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi standar tersebut masih belum banyak diteliti secara spesifik di Kecamatan Indramayu. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana pemahaman, sikap, dan praktik pelaku UMKM di Kecamatan Indramayu terhadap penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan mereka.

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran faktual mengenai sejauh mana SAK EMKM telah diterapkan oleh pelaku UMKM di daerah tersebut, apa saja hambatan yang mereka hadapi, serta apa rekomendasi kebijakan atau program pendampingan yang perlu dilakukan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik sekaligus referensi praktis bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan asosiasi profesi dalam merancang strategi peningkatan kualitas laporan keuangan UMKM di daerah.

Selain itu, studi ini diharapkan juga dapat memperkaya khazanah literatur ilmiah di bidang akuntansi sektor UMKM, khususnya yang berfokus pada implementasi standar akuntansi yang relevan dan aplikatif di tingkat lokal. Dengan mengkaji kasus di Kecamatan Indramayu, penelitian ini memberikan konteks nyata mengenai tantangan dan peluang penerapan SAK EMKM di daerah yang merepresentasikan kondisi umum UMKM di Indonesia. Rumusan masalah yang dapat dimunculkan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tingkat pemahaman pelaku UMKM di Kecamatan Indramayu terhadap standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

2. Bagaimana praktik Menyusun laporan keuangan yang dilakukan oleh UMKM di Kecamatan Indramayu
3. Apa strategi atau upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Indramayu

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pengalaman, pemahaman dan praktik pelaku UMKM dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dalam penyusunan laporan keuangan

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu Jawa barat yang merupakan salah satu Kawasan dengan konsentrasi UMKM cukup tinggi. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung selama bulan Maret hingga Mei 2025.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pelaku UMKM yang aktif menjalankan usaha di Kecamatan Indramayu. Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini meliputi :

- a. UMKM yang telah berdiri minimal 2 tahun
- b. Pelaku usaha memiliki atau pernah Menyusun catatan atau laporan keuangan
- c. Pelaku usaha bersedia diwawancarai dan menjadi bagian dari studi kasus

Jumlah informan ditentukan secara purposive sampling yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi dan kedalaman informasi yang dapat diberikan. Jumlah informan dapat disesuaikan dengan prinsip saturasi data, yakni hingga tidak ditemukan lagi informasi baru yang signifikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM terhadap SAK EMKM

Hasil wawancara dengan 10 pelaku UMKM di Kecamatan Indramayu menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha belum mengetahui secara mendalam tentang keberadaan dan isi dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Hanya 3 dari 10 responden yang mengaku pernah mendengar istilah SAK EMKM, dan itupun secara sepintas dari pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Sementara itu, 7 pelaku UMKM lainnya belum pernah mendengar istilah tersebut.

Ketidaktahuan ini berdampak langsung pada rendahnya minat dan upaya untuk menerapkan standar akuntansi dalam praktik keuangan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa **literasi akuntansi pelaku UMKM di Kecamatan Indramayu masih tergolong rendah**, sebagaimana juga disimpulkan oleh Setyowati & Lestari (2021) dan diperkuat oleh studi oleh Wahyuni & Sari (2024) yang menyatakan bahwa sebagian besar UMKM tidak memahami manfaat pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis standar.

2. Praktik Penyusunan Laporan Keuangan oleh UMKM

Sebagian besar pelaku UMKM di Kecamatan Indramayu masih mengandalkan pencatatan keuangan yang sangat sederhana, bahkan tidak sedikit yang tidak mencatat keuangan sama sekali. Hanya 2 dari 10 pelaku usaha yang memiliki laporan keuangan berbentuk tabel arus kas harian dan rekap pendapatan bulanan. Namun, laporan tersebut belum sesuai dengan struktur dan prinsip yang diatur dalam SAK EMKM.

Berikut ini adalah temuan terkait praktik pelaporan keuangan:

- 4 UMKM menggunakan buku tulis untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran harian, namun tidak dilakukan rekap atau penyusunan laporan berkala.
- 3 UMKM hanya menyimpan struk belanja dan hasil penjualan dalam amplop atau folder.
- 1 UMKM menggunakan aplikasi digital sederhana seperti Excel untuk mencatat transaksi, namun tidak membuat laporan formal.
- 2 UMKM tidak memiliki pencatatan sama sekali dan hanya mengandalkan ingatan atau perkiraan bulanan.

Temuan ini menunjukkan bahwa praktik pelaporan keuangan masih belum terstruktur dan belum mendukung pembuatan laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi seperti yang diatur dalam SAK EMKM.

3. Tingkat Penerapan SAK EMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Dari hasil observasi dan dokumentasi, tidak ada satu pun UMKM yang menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan SAK EMKM, meskipun beberapa informan menunjukkan minat untuk belajar. Hambatan utama yang dirasakan adalah:

- Ketidaktahuan akan keberadaan standar tersebut.
- Anggapan bahwa menyusun laporan keuangan terlalu rumit dan hanya relevan untuk usaha besar.
- Keterbatasan waktu dan tenaga untuk melakukan pencatatan secara rutin.
- Ketidadaan pendampingan teknis dari pihak terkait.

Meskipun beberapa pelaku UMKM menyatakan kesediaan untuk mencoba menyusun laporan keuangan formal, mereka mengaku memerlukan bantuan dari tenaga ahli atau pendamping yang

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada poin 1 hingga 3, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK EMKM di Kecamatan Indramayu masih sangat rendah. Mayoritas pelaku usaha belum mengetahui keberadaan Standar Akuntansi Keuangan EMKM secara mendalam, dan hanya sebagian kecil yang pernah mendengar istilah tersebut tanpa memahami isi dan manfaatnya. Hal ini menunjukkan bahwa literasi akuntansi di kalangan UMKM masih menjadi tantangan besar, yang perlu segera ditangani melalui edukasi dan sosialisasi yang sistematis.
2. Praktik penyusunan laporan keuangan oleh UMKM masih bersifat sederhana dan tidak sesuai standar. Sebagian besar pelaku usaha hanya mencatat transaksi secara manual, terbatas pada pemasukan dan pengeluaran harian, tanpa penyusunan laporan keuangan periodik. Bahkan terdapat pelaku UMKM yang tidak melakukan pencatatan keuangan sama sekali. Ketidakteraturan ini menyebabkan mereka kesulitan untuk menilai kondisi usahanya secara objektif dan menghambat akses terhadap pembiayaan formal.
3. Penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan belum berjalan secara optimal. Tidak ditemukan UMKM yang menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan struktur dan prinsip yang diatur dalam SAK EMKM. Hambatan utama berasal dari kurangnya pengetahuan teknis, minimnya pendampingan, dan persepsi bahwa akuntansi adalah sesuatu yang rumit dan hanya cocok untuk usaha besar. Hal ini memperkuat kebutuhan akan pendekatan yang lebih aplikatif dan kontekstual dalam mengimplementasikan standar akuntansi tersebut pada sektor UMKM.

Dengan demikian, untuk meningkatkan penerapan SAK EMKM di Kecamatan Indramayu, diperlukan intervensi nyata melalui pelatihan, pendampingan teknis, serta penguatan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya pencatatan dan pelaporan keuangan yang terstandar. Pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi profesi akuntansi perlu berkolaborasi untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.

REFERENSI

- Abdullah, A., Rofiqoh, A. N., & Amrina, N. (2025). *Mitigasi ketidakpatuhan UMKM dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)*. Retrieved from <https://id.scribd.com/document/829127409/>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). *Data UMKM Indonesia Tahun 2022/2023*. Retrieved from <https://kemenkopukm.go.id>
- Nurhasanah, N., & Harahap, R. H. (2020). Analisis penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 7(2), 115–127.
- Sari, D. R., & Wahyuni, A. (2023). Tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap standar akuntansi keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, 8(1), 45–56.
- Setyowati, R., & Lestari, A. (2021). Literasi akuntansi dan kendala penyusunan laporan keuangan pada UMKM. *Jurnal Keuangan Mikro*, 4(3), 92–101.
- Tambunan, T. T. H. (2022). *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Perkembangan, Masalah dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ulil Albab Institute. (2025). *Analisis persepsi pelaku UMKM terhadap SAK EMKM pada CV Firdilla Zenaf*. *Jurnal CEKI*, 4(2), 88–97. Retrieved from <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/9384>
- Wahyuni, L., & Sari, N. (2024). Strategi pendampingan akuntansi berbasis SAK EMKM pada UMKM di wilayah Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian dan Inovasi*, 6(1), 22–35.

- Warunayama, R. (2024). Studi kasus penerapan SAK EMKM pada UMKM Royal Sakinah Catering. *Jurnal Musytari Neraca*, 3(2), 103–117. Retrieved from <https://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/article/view/3759>
- Zahra, N. (2024). Kesiapan penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM Zamel Snack. *ResearchGate Publication*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/393197671>